

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG
KELUARGA BERKUALITAS (KB) DI DESA KAYAKAH
KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



**OLEH:
RAHMAWATI
NPM 2022434**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)
Amuntai
2026**

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama:

Nama : RAHMAWATI
NPM : 2022434
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DI DESA
KAYAKAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

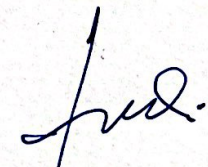
Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

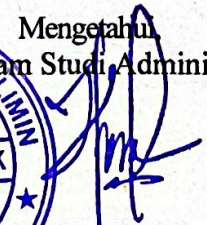
Amuntai, April 2026

Pembimbing I


Drs. H. Arpandi, M.AP
NUPTK. 8554741642130083

Pembimbing II


M. Noor Fuadi, S.Sos., M.AP
NUPTK. 1152758663200003

Mengetahui
Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK 199211042015091021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang.

Proposal skripsi yang berjudul "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KB) DI DESA KAYAKAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA" ditulis dalam rangka memenuhi tugas yang diwajibkan untuk semua mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana (S1).

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas sumbangan pikiran dan dukungan yang penulis dapatkan. Penulis berusaha untuk menyajikan proposal skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan semampu penulis. Penulis berharap proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain yang membutuhkan informasi terkait proposal skripsi ini. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis di masa depan.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar besanya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian., S.Sos.,M.AP.,CIQaR.,CIQnR selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmi Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.

3. Bapak Drs. H. Arpandi, M.AP. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak M. Noor Fuadi, S.Sos., M.AP. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah membimbing dan memberikan ilmu.

Amuntai, Minggu, 29 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan Manfaat.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Tipe Penelitian.....	27
D. Data Dan Sumber Data.....	28
E. Desain Operasional Penelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	34
H. Uji Kredibilitas.....	35
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Pemikiran	26
--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Informan.....	30
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 284,4 juta jiwa pada tahun 2025, yang merupakan sekitar 3,46% dari total populasi dunia. Pada 2024, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 281.603 juta jiwa. Kemudian jumlahnya meningkat sekitar 0,51% hingga 1,31% tergantung pada tanggal acuan yang digunakan hingga tahun 2025.

Kependudukan adalah masalah nasional yang berdampak kepada masyarakat luas. disatu sisi bahwa penduduk yang besar merupakan modal dalam pembangunan, karena di situ terdapat jumlah angkatan kerja yang cukup besar pula. Dipihak lain bahwa penduduk yang besar merupakan beban pemerintah dalam kaitannya kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder.

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, tekanan terhadap sumber daya alam, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, juga menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, pengendalian pertumbuhan penduduk menjadi prioritas dalam pembangunan daerah, salah satunya dengan program KB.

Keluarga Berencana merupakan rancangan asas serta usaha yang akan dijalankan oleh Masyarakat yang menghimpun dan meminta segenap kemampuan, kekuatan, energi dan daya Masyarakat untuk berperan aktif dalam melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil Bahagia Sejahtera dalam Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (UU No. 52 Tahun 2009).

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), keluarga berencana didefinisikan sebagai "kemampuan individu dan pasangan untuk mengantisipasi dan mencapai jumlah anak yang mereka inginkan serta jarak dan waktu kelahiran mereka. Hal ini dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan pengobatan infertilitas yang tidak disengaja" Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014).

Dasar hukum kebijakan KB mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 78 yang menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur guna membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa Kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Pemerintah bertanggung jawab menjamin penyediaan pelayanan KB yang aman dan bermutu sesuai standar

profesi dan etik, yang berkelanjutan, dan dapat menjangkau dan terjangkau masyarakat.

Penetapan Desa Kayakah sebagai lokus Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didasarkan pada kriteria wilayah dan capaian program kependudukan yang memerlukan intervensi khusus di Kecamatan Amuntai Selatan. Sebagai desa yang memiliki karakteristik geografis wilayah bantaran sungai dan rawa, Desa Kayakah menghadapi tantangan aksesibilitas layanan kesehatan serta angka partisipasi Keluarga Berencana yang perlu ditingkatkan guna menekan angka *unmet need*.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta bahwa implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan, belum berjalan sebagaimana mestinya. Fenomena masalahnya yaitu;

1. Pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Kayakah terhambat karena tidak adanya alokasi anggaran yang memadai. Kondisi ini menyebabkan berbagai agenda strategis seperti sosialisasi dan pembinaan keluarga tidak dapat direalisasikan, sehingga program kehilangan daya dukung utamanya untuk bergerak secara optimal. Hal ini memicu stagnasi organisasi, dimana pengurus kehilangan semangat kerja dan cenderung pasif dalam menjalankan program.
2. Minimnya pelaksanaan kegiatan dalam Program Kampung KB, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat, menyebabkan penyebaran informasi mengenai tujuan, manfaat, dan ruang lingkup program tidak berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada

rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Program Kampung KB, sehingga partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan juga cenderung rendah.

3. Masyarakat masih cenderung memandang program ini hanya sebatas upaya pengendalian jumlah penduduk, tanpa memahami bahwa Program Kampung KB juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan, sehingga tujuan program belum tercapai secara maksimal.
4. Kurang koordinasi dan komitmen antar pelaksana Program Kampung KB, baik aparatur desa ataupun petugas di lapangan yang menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan tidak konsistennya pelaksanaan kegiatan, lemahnya pengawasan, serta minimnya evaluasi terhadap program yang telah dijalankan.

Dari adanya kendala dari fenomena masalah di atas yang menyebabkan pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif. Fenomena tersebut menunjukkan adanya permasalahan pada aspek kejelasan tujuan, strategi, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program, serta masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan pedoman teknis maupun tujuan ideal program itu sendiri. Oleh karena itu, permasalahan ini relevan untuk dianalisis menggunakan teori efektivitas organisasi menurut Sondang P. Siagian.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk proposal

skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KB DI DESA KAYAKAH KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, diperlukan suatu pendekatan teoritis yang mampu menganalisis efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Fokus penelitian dalam skripsi ini diarahkan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas pelaksanaan program Kampung KB melalui kriteria efektivitas organisasi menurut teori Sondang P. Siagian (2008:77). Adapun fokus penelitian tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan
2. Kejelasan strategi
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan
4. Perencanaan
5. Penyusunan program
6. Tersedianya sarana, prasarana, dan alokasi anggaran.
7. Pelaksanaan program
8. Sistem pengawasan dan pengendalian.

C. Rumusan Masalah

Dari hasil observasi peneliti, maka terciptalah 2 rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangkan pemahaman, penalaran, dan pengalaman penulis dalam konteks Ilmu Administrasi Publik

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Desa Kayakah dalam permasalahan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah Program Kampung

Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kebijakan sosial terkait dengan penanganan masalah Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini ditulis oleh Muhammad Sholihin dengan judul "**Efektivitas Program Kampung KB di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan**". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program Kampung KB dalam membentuk keluarga sejahtera di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, Sholihin menemukan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB di Desa Pakan Dalam belum berjalan efektif. Hal ini ditunjukkan oleh indikator pelaksanaan, pencapaian target, dan pencapaian tujuan yang masih belum maksimal. Adapun faktor penghambat utama yang ditemukan meliputi rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, minimnya penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), serta masih tingginya angka stunting di wilayah tersebut.

Terdapat persamaan dan perbedaan mendasar antara penelitian Sholihin dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya terletak pada topik kajian mengenai efektivitas Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) serta penggunaan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, perbedaan signifikan terdapat pada lokasi dan pisau analisis yang digunakan. Penelitian Sholihin dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator efektivitas yang bersifat umum (perencanaan, pengawasan, dan

realisasi). Sedangkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Kayakah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan fokus analisis yang lebih spesifik mengacu pada teori Sondang P. Siagian yaitu Kejelasan Tujuan, Kejelasan Strategi, Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan, Perencanaan, Penyusunan Program, Tersedianya Sarana Prasarana dan Alokasi Anggaran, Pelaksanaan Program, Sistem Pengawasan dan Pengendalian. Perbedaan fokus teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran efektivitas yang lebih terukur dari aspek manajemen program.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2024) dengan judul **"Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar"** juga menjadi rujukan relevan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan program Kampung KB dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Nurhidayah menunjukkan bahwa program Kampung KB di Desa Simpang Petai belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain: kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung, adanya hambatan dari aspek budaya dan agama, serta masih kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh kader-kader Kampung KB. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian efektivitas program dan penggunaan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada lokasi penelitian dan pisau analisis yang digunakan. Nurhidayah melakukan penelitian di Provinsi Riau dengan menggunakan indikator teori Ni Wayan Budiani (2007) yang meliputi

ketepatan sasaran, sosialisasi, tujuan, dan pemantauan. Sedangkan penulis melakukan penelitian di Desa Kayakah dengan menggunakan teori Sondang P. Siagian yaitu Kejelasan Tujuan, Kejelasan Strategi, Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan, Perencanaan, Penyusunan Program, Tersedianya Sarana Prasarana dan Alokasi Anggaran, Pelaksanaan Program, Sistem Pengawasan dan Pengendalian. Perbedaan indikator ini akan memberikan perspektif analisis yang berbeda dalam menilai keberhasilan program.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Efektivitas

a) Pengertian Efektivitas

Secara etimologis, istilah efektivitas berakar dari kata 'efektif' yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki efek, pengaruh, atau akibat yang ditimbulkan; manjur; serta dapat membawa hasil yang memuaskan. Dalam konteks manajemen organisasi dan administrasi publik, konsep ini berkembang lebih jauh dari sekadar definisi kebahasaan. Pasolong (2021) menegaskan bahwa efektivitas adalah ukuran derajat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan mampu memenuhi target yang direncanakan, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu, sehingga memberikan dampak nyata bagi sasarannya.

Efektivitas menurut berbagai literatur buku manajemen dan organisasi adalah tingkat keberhasilan atau kemampuan dalam mencapai

tujuan, sasaran, atau hasil yang telah ditetapkan sebelumnya melalui penggunaan sumber daya secara tepat. Secara umum, efektivitas menekankan pada "melakukan hal yang benar" (*doing the right things*) untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Efektivitas organisasi adalah konsep yang mencakup kemampuan suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif. Dalam konteks modern, efektivitas dipahami sebagai derajat keberhasilan dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan mempertimbangkan pentingnya relatif dari tujuan tersebut (Wardhana et al., 2024). Selain itu, efektivitas juga diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana semakin hasil kegiatan mendekati tujuan, maka semakin tinggi efektivitasnya (Agustina, 2020).

Lebih lanjut, Makmur merinci bahwa efektivitas pelaksanaan suatu program atau aktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh lima dimensi atau indikator utama. Kelima indikator tersebut adalah:

- 1) Ketepatan Waktu (*Timeliness*) Ketepatan waktu adalah indikator paling mendasar. Suatu program dikatakan efektif apabila dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan dalam pelaksanaan program, meskipun tujuannya tercapai, akan mengurangi nilai efektivitas karena dapat menghambat program-program lain yang berkaitan.
- 2) Ketepatan Perhitungan Biaya (*Cost Accuracy*) Efektivitas tidak bisa dipisahkan dari efisiensi. Makmur menekankan bahwa penggunaan sumber daya anggaran harus diperhitungkan secara cermat. Program

yang boros atau mengalami pembengkakan anggaran (*over-budget*) menandakan ketidakefektifan dalam perencanaan, meskipun hasil fisiknya tercapai.

- 3) Ketepatan Menentukan Tujuan (*Goal Setting Accuracy*) Tujuan adalah titik akhir yang ingin dicapai. Efektivitas mensyaratkan bahwa tujuan organisasi atau program harus dirumuskan secara realistis, spesifik, dan dapat diukur. Tujuan yang terlalu abstrak atau mustahil dicapai akan membuat pelaksanaan program menjadi sia-sia.
 - 4) Ketepatan Sasaran (*Target Accuracy*) Ini menyangkut subjek atau objek yang menjadi penerima manfaat program. Program dikatakan efektif jika manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan. Dalam konteks kebijakan publik, kesalahan dalam menentukan sasaran (salah sasaran) merupakan bentuk inefektivitas yang paling fatal.
 - 5) Ketepatan Melakukan Perintah (*Compliance*) Indikator ini berkaitan dengan kepatuhan pelaksana terhadap prosedur atau perintah yang berlaku. Efektivitas tercapai jika para pelaksana di lapangan bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan arahan pimpinan, tanpa melakukan penyimpangan yang dapat merugikan organisasi."
- b) Efektivitas (Sondang P. Siagian)

Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas bukan sekadar soal hasil akhir, melainkan sebuah kesatuan sistem yang melibatkan berbagai

faktor pendukung dari awal perencanaan hingga tahap evaluasi. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran. Berikut adalah penjabaran mendalam mengenai delapan variabel atau ukuran efektivitas menurut Siagian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1) Kejelasan Tujuan yang Hendak Dicapai

Variabel pertama dan yang paling mendasar adalah adanya tujuan yang jelas. Dalam sebuah organisasi atau program seperti Kampung KB, tujuan berfungsi sebagai kompas atau arah ke mana seluruh tenaga dan pikiran harus dicurahkan. Jika tujuan tidak dirumuskan secara spesifik dan dipahami oleh seluruh pengurus, maka operasional di lapangan akan kehilangan arah. Efektivitas hanya bisa diukur jika organisasi memiliki target nyata; tanpa target, kita tidak akan pernah tahu apakah program tersebut berhasil atau gagal.

2) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

Jika tujuan adalah destinasi, maka strategi adalah peta jalannya. Strategi mencakup pedoman pokok dan langkah-langkah besar yang dipilih organisasi untuk memastikan tujuan tadi bisa diraih dengan risiko terkecil dan hasil maksimal. Kejelasan strategi memastikan bahwa para kader di tingkat lapangan tidak hanya sekadar "bekerja", tapi bekerja dengan pola yang sudah teruji dan sistematis. Tanpa

strategi yang matang, program hanya akan berjalan secara reaktif dan mudah goyah saat menghadapi hambatan di lapangan.

3) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan yang Mantap

Sebelum sebuah tindakan diambil, organisasi harus melalui proses analisis yang mendalam. Variabel ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan sekadar intuisi atau mengikuti tren semata. Kebijakan yang mantap lahir dari pemahaman terhadap kondisi riil masyarakat sasaran. Hal ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pengurus—mulai dari teknis penyuluhan hingga alokasi anggaran—memang relevan dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

4) Perencanaan yang Matang

Perencanaan adalah jembatan antara ide dan aksi. Dalam variabel ini, efektivitas diukur dari sejauh mana organisasi mampu menyusun jadwal kerja, pembagian tugas, dan penentuan target waktu yang logis. Perencanaan yang matang akan meminimalisir adanya tumpang tindih kewenangan atau kebingungan tugas antar pengurus. Dengan adanya rencana yang terdokumentasi, setiap pihak yang terlibat memiliki panduan baku mengenai apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan siapa yang bertanggung jawab.

5) Penyusunan Program yang Tepat

Variabel ini berfokus pada penjabaran rencana ke dalam aksi-aksi nyata atau kegiatan operasional harian. Program yang tepat adalah program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat

sasaran secara langsung. Penyusunan program yang serampangan atau tidak sesuai dengan kondisi lingkungan sosial hanya akan membuang-buang sumber daya. Efektivitas sebuah program sangat bergantung pada ketepatan jenis kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat agar partisipasi publik dapat tumbuh secara alami.

6) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

Siagian menegaskan bahwa produktivitas dan efektivitas organisasi mustahil tercapai tanpa dukungan sarana, prasarana, dan dana yang memadai. Dana dan alat kerja adalah "bahan bakar" utama bagi motor organisasi. Jika alokasi anggaran operasional tidak tersedia (nol rupiah), maka rencana secanggih apapun akan mandek. Ketersediaan dana memungkinkan organisasi untuk mengadakan sosialisasi, menyediakan media penyuluhan, hingga memberikan biaya operasional bagi pengurus agar mereka bisa bergerak secara lincah di lapangan.

7) Pelaksanaan yang Efektif dan Efisien

Variabel ini berkaitan langsung dengan aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Sebaik apapun sebuah program dirancang, faktor penentu akhirnya ada pada orang yang mengeksekusinya. Pelaksanaan yang efektif menuntut adanya komitmen, motivasi, dan kedisiplinan dari para pengurus. Pengurus yang memiliki gairah kerja tinggi akan memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Namun, motivasi ini juga berkaitan erat dengan variabel

dana; tanpa dukungan dana yang layak, motivasi pelaksana cenderung akan merosot dan menghambat jalannya program.

8) Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik

Variabel terakhir adalah fungsi kontrol atau monitoring. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, sistem pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tetap berada pada rel yang benar. Pengawasan menurut Siagian tidak boleh hanya bersifat mencari kesalahan, tetapi harus bersifat mendidik dan mencari solusi. Misalnya, jika ditemukan kendala anggaran yang macet, pengawasan berfungsi untuk melaporkan masalah tersebut ke tingkat desa agar segera dicari jalan keluarnya, sehingga hambatan tersebut tidak berlarut-larut merusak efektivitas program.

c) Ukuran Efektivitas

Untuk mengukur keberhasilan suatu program publik, diperlukan indikator yang terukur dan relevan dengan kondisi lapangan. Penelitian ini mengacu pada dimensi efektivitas menurut Pasolong (2021), yang menegaskan bahwa keberhasilan program publik sangat ditentukan oleh akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan. Dimensi tersebut meliputi: ketepatan penentuan kelompok sasaran, efektivitas komunikasi (sosialisasi) kepada masyarakat, tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta berjalannya fungsi pengawasan (monitoring) untuk menjamin kesesuaian prosedur Ketepatan Sasaran Program.

Indikator ini menilai sejauh mana peserta atau penerima manfaat program sudah tepat sesuai dengan rencana awal. Dalam konteks

Kampung KB di Desa Kayakah, ketepatan sasaran dilihat dari apakah program benar-benar menyasar keluarga pra-sejahtera, Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum ber-KB, serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Ketepatan sasaran sangat menentukan keberhasilan program, karena jika sasaran tidak tepat, maka tujuan program tidak akan tercapai meskipun pelaksanaannya berjalan lancar.

1) Sosialisasi Program

Indikator ini mengukur sejauh mana transmisi informasi kebijakan dapat diterima dan dipahami oleh kelompok sasaran. Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, komunikasi atau sosialisasi merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan suatu program. **Agustino (2020)** menegaskan bahwa penyampaian informasi harus dilakukan secara jelas, konsisten, dan akurat agar tidak terjadi distorsi atau misinterpretasi di tengah masyarakat. Sosialisasi yang efektif tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan (kognitif), tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan (afektif), sehingga masyarakat secara sukarela berpartisipasi aktif dalam menyukseskan tujuan program tersebut.

2) Pencapaian Tujuan Program

Indikator ini melihat kesesuaian antara hasil nyata di lapangan dengan tujuan ideal program. Hal ini dapat dilihat dari *output* riil seperti peningkatan angka partisipasi ber-KB, penurunan angka pernikahan dini, atau perbaikan data administrasi kependudukan di desa tersebut. Semakin besar kesesuaian antara hasil yang dicapai

dengan tujuan yang ditetapkan, maka semakin efektif program tersebut.

3) Pemantauan Program (*Monitoring*)

Pemantauan atau monitoring merupakan elemen krusial untuk mengawal jalannya suatu program agar tidak melenceng dari pedoman dan perencanaan awal. Menurut Jannah dan Nafi'ah (2023), pemantauan program adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap suatu program yang sedang berlangsung guna mengetahui tingkat perkembangannya.

2. Konsep Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

a. Pengertian Kampung KB

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa atau kelurahan yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya. Konsep ini merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dengan pembangunan sektor terkait lainnya secara sistematis. (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3, 2022).

Pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dan mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Instruksi ini mencakup langkah-langkah untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, memberdayakan dan

memperkuat institusi keluarga, serta membangun ketahanan keluarga melalui program-program yang langsung menyasar masyarakat. Dengan implementasi instruksi ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat dapat meningkat secara keseluruhan. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan pendekatan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan secara terintegrasi untuk memperkuat dan memberdayakan keluarga (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3, 2022).

Berdasarkan Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (BKKBN, 2023), Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) didefinisikan sebagai satuan wilayah setingkat desa di mana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan Masyarakat.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan di Kampung KB meliputi:

- 1) Kependudukan;
- 2) Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 3) Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)
- 4) Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB).

b. Persyaratan Pembentukan Kampung KB

1) Prasyarat Wajib

Ada tiga syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum membentuk Kampung KB:

- a) Tersedianya Data Kependudukan yang Akurat: Data yang bersumber dari Hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa, dan data Catatan Sipil yang akurat sebagai dasar penetapan sasaran.
- b) Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah: Peran aktif pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program.
- c) Partisipasi Masyarakat yang Aktif: Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan secara berkesinambungan.

2) Kriteria Pemilihan Wilayah

Selain prasyarat wajib, wilayah yang dipilih harus memenuhi kriteria berikut:

a) Kriteria Utama (Wajib Dipenuhi):

- (1) Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) di atas rata-rata tingkat desa/kelurahan.
- (2) Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian tingkat desa/kelurahan.

b) Kriteria Wilayah (Kondisi Lingkungan):

Wilayah tersebut juga sebaiknya memenuhi satu atau lebih kriteria berikut: Kawasan kumuh, pesisir/nelayan, Daerah Aliran Sungai (DAS), bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk

miskin perkotaan), terpencil, perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, atau padat penduduk.

c. Tujuan Kampung KB

Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022, tujuan penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) telah bertransformasi menjadi lebih komprehensif. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberdayakan dan memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana yang terintegrasi dengan pembangunan sektor terkait.

Secara spesifik, tujuan tersebut dijabarkan sebagai upaya untuk:

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk akses terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan, guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta prevalensi *stunting*.
- 2) Memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan ekonomi mikro dan kewirausahaan, sehingga keluarga mampu mandiri secara finansial.
- 3) Meningkatkan cakupan dan kualitas data kependudukan yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan desa yang tepat sasaran.
- 4) Mewujudkan lingkungan pemukiman yang sehat, bersih, dan saniter untuk mendukung tumbuh kembang keluarga yang optimal.
- 5) Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan lintas sektor dalam pembangunan desa, sehingga program tidak lagi bersifat *top-down*

melainkan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat setempat (Kemenko PMK, 2022)."

d. Dasar Hukum Program Kampung KB

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengatur upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. UU yang disahkan pada 29 Oktober 2009 ini mencakup pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas, serta pengarahan mobilitas penduduk.

Program Kampung KB (Kampung Keluarga Berkualitas) merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk. Program ini dilaksanakan secara terpadu di tingkat desa atau kelurahan dengan mengintegrasikan berbagai layanan seperti keluarga berencana, kesehatan reproduksi, pendidikan, dan peningkatan ekonomi keluarga. Kampung KB juga menekankan partisipasi aktif masyarakat serta kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan keluarga kecil, sehat, dan sejahtera, khususnya di wilayah yang memiliki permasalahan kependudukan seperti kemiskinan dan keterbatasan akses layanan.

Poin-Poin Penting UU No. 52 Tahun 2009:

- a) Tujuan: Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, meningkatkan kualitas penduduk (fisik/non-fisik), dan membangun keluarga berkualitas yang sejahtera, sehat, dan mandiri.
 - b) Keluarga Berencana (KB): Diatur pada Pasal 20 & 21 untuk membantu pasangan memutuskan usia ideal perkawinan, jumlah anak, dan jarak kelahiran, dengan melarang promosi aborsi.
 - c) Pengendalian Penduduk: Dilakukan pada tingkat nasional dan daerah, mencakup penurunan angka kematian ibu/bayi dan kebijakan mobilitas penduduk.
 - d) Lembaga Pelaksana: Menegaskan peran BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian penduduk dan program keluarga berencana.
 - e) Pencabutan UU Lama: UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2014. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mempromosikan perkembangan penduduk yang seimbang, pembangunan keluarga,

serta implementasi program Keluarga Berencana (KB) dan Sistem Informasi Keluarga (SIK).

Sejalan dengan perkembangan kependudukan, pertumbuhan penduduk masih cukup tinggi, demikian juga halnya dengan angka kelahiran masih cukup tinggi yang berpengaruh pada pemenuhan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Tingginya angka kelahiran tersebut harus dikendalikan melalui penyelenggaraan Keluarga Berencana agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Penyelenggaraan Keluarga Berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah anak, jarak ideal kelahiran anak, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Upaya-upaya dalam penyelenggaraan Keluarga Berencana dilakukan melalui peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat, pembinaan keluarga, pengaturan kehamilan dengan memperhatikan agama, kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya, serta tata nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kebijakan Program KB yang lahir dari Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 didasari untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas harus dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian,

pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, serta meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 ini, perubahan yang ingin dicapai pemerintah melalui program ini tercantum dalam Pasal (2).

C. Kerangka Pemikiran

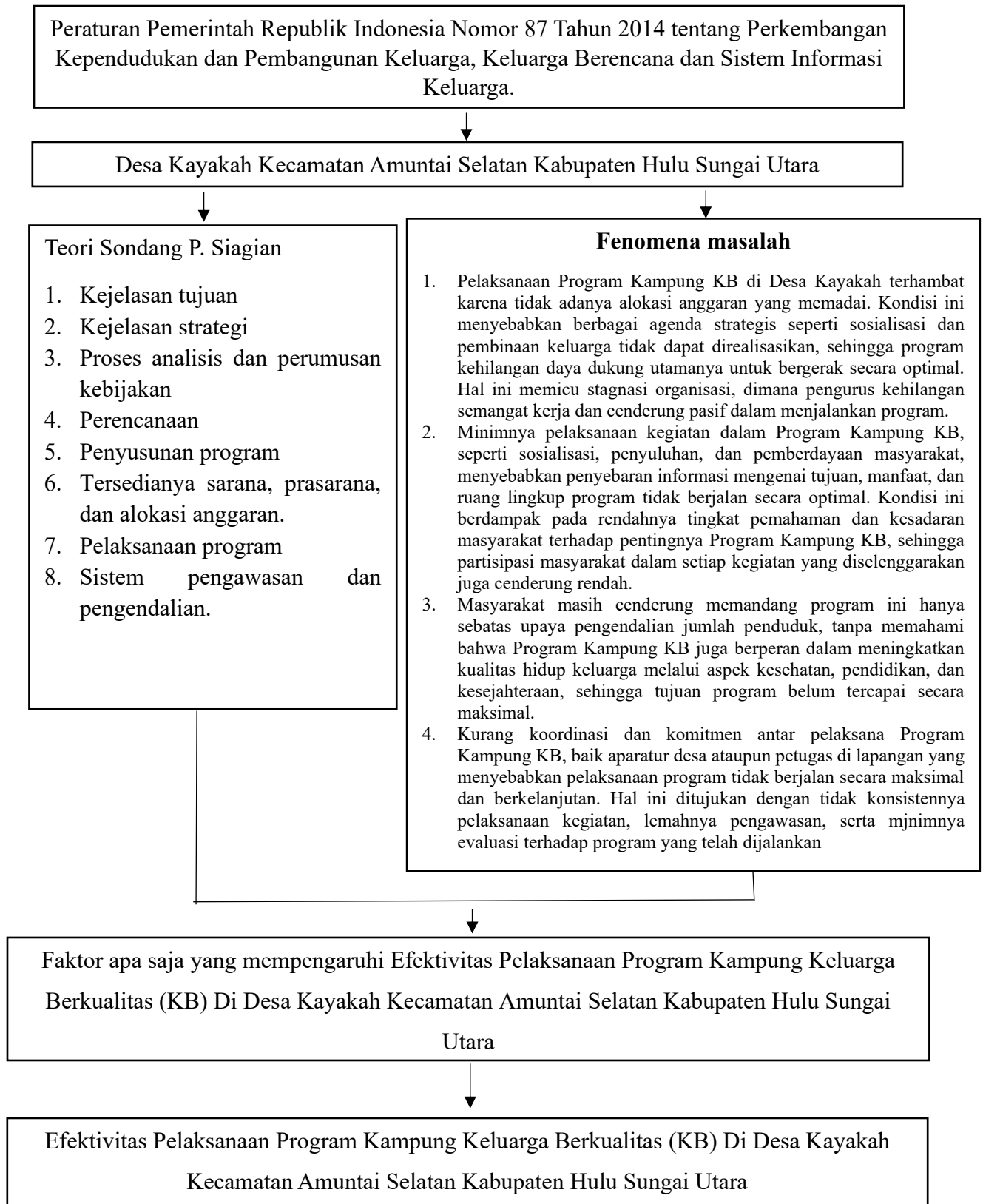
Kerangka berpikir merupakan fondasi konseptual yang menghubungkan teori dengan masalah yang diteliti. Menurut Syahputri (2023), kerangka berpikir adalah dasar pemikiran penelitian yang disintesis dari fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang memuat konsep-konsep sebagai landasan untuk memecahkan masalah penelitian.

Berdasarkan bagan di atas, alur pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari Input, yaitu adanya landasan regulasi berupa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. Namun, pada proses pelaksanaannya di desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan, ditemukan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Berdasarkan observasi awal, pelaksanaan program belum berjalan sebagaimana mestinya dan terdapat kendala operasional yang menghambat efektivitas program.

Untuk menganalisis masalah tersebut, peneliti menetapkan fokus penelitian menggunakan teori Efektivitas menurut Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis.

Berikut tabel detail rangkaian penelitian

Gambar 2 1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jln. Pertahanan Devisi IV, Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, kode pos 71452.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan pendekatan ini dikumpulkan informasi dengan mendalami fenomena yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang terjadi sebenarnya.

Menurut Sugiyono (2022:9) yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu memberikan gambaran atau menyajikan data sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya dengan harapan mendapatkan gambaran yang menyeluruh sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai.

Menurut Rakhmat (dalam Ibrahim 2018:59) Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan untuk melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu, dengan mengumpulkan data secara univarian, yang digunakan untuk mencari teori-teori tentatif, bukan menguji.

Secara konkret penulis dalam penelitian ini akan mendeskripsikan fenomena. Fokusnya adalah gambaran secara menyeluruh mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui proses berupa pengumpulan data kualitatif analisis dan penelitian data tersebut dengan merujuk pada konsep atau teori yang relevan.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a) Data primer

Data primer mengacu pada data yang telah dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk menjawab masalah penelitian secara spesifik. Cara paling umum untuk mengumpulkan data primer ini, khususnya dalam penelitian kuantitatif, adalah melalui penggunaan eksperimen dan survei langsung di lapangan. Keunggulan utamanya adalah data yang diperoleh benar-benar baru, akurat, dan sangat sesuai dengan kebutuhan spesifik penelitian. Namun, harus diingat bahwa pengumpulan data primer ini biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar (Hardani dkk., 2020:401).

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan dari sumber tidak langsung atau pihak kedua. Peneliti biasanya mendapatkan data ini dari dokumen tertulis, laporan resmi pemerintah, ataupun arsip perpustakaan. Penggunaan data sekunder ini sangat membantu karena peneliti tidak perlu terjun langsung ke lapangan, sehingga proses penelitian menjadi jauh lebih hemat waktu, tenaga, dan juga biaya. (Hardani dkk., 2020:401).

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. Sumber data pada penelitian ini adalah informan, yang dimaksud dengan informan adalah seseorang atau kelompok yang mengetahui secara teknis dan detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan dipelajari.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Merujuk pada Sugiyono (2022:95-96), purposive sampling didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti memilih teknik ini adalah untuk memastikan bahwa informan yang terpilih benar-benar orang yang paling memahami masalah yang sedang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Pada penelitian ini ada informan di antaranya:

Tabel 3. 1
Tabel Informan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kabid Keluarga Berkualitas	1 orang
2	Koordinator PKB Amuntai Selatan	1 orang
3	Kepala Desa Kayakah	1 orang
4	PPKBD Desa Kayakah	1 orang
5	Sub PPKBD Desa Kayakah	1 orang
6	Bidan Desa Kayakah	1 orang
7	Penyuluh KB Desa Kayakah	2 orang
8	Masyarakat Desa Kayakah	4 orang

E. Desain Operasional Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengamatan dan wawancara di lapangan, maka fokus penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) di Desa Kayakah dijabarkan ke dalam desain operasional berdasarkan teori Sondang P. Siagian

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah kemampuan suatu organisasi atau program dalam merealisasikan target utama yang telah ditetapkan sebelumnya secara maksimal. Suatu program dikatakan efektif apabila *output* atau hasil nyatanya sejalan dengan tujuan ideal penciptaan program tersebut. Dalam konteks administrasi publik, dimensi ini menyoroti apakah operasional program di lapangan benar-benar menyentuh sasaran yang tepat dan memberikan manfaat langsung kepada kelompok masyarakat yang dituju

2. Integrasi

Integrasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk menyatukan berbagai elemen di dalamnya melalui proses komunikasi, sosialisasi, dan koordinasi yang baik agar dapat bergerak bersama menuju satu tujuan. Dimensi ini menilai sejauh mana tingkat kekompakan, pemahaman, dan motivasi para pelaksana program, serta bagaimana pelaksana mampu merangkul masyarakat atau *stakeholder* terkait. Tanpa adanya integrasi yang solid antar pengurus dan partisipasi dari masyarakat, sebuah program akan kesulitan berjalan dengan efektif.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu program atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika, tuntutan, dan kendala yang muncul dari lingkungan internal maupun eksternal demi mempertahankan eksistensinya. Program publik yang efektif harus fleksibel dan responsif terhadap hambatan tak terduga, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit, atau menurunnya minat masyarakat. Kemampuan beradaptasi menentukan apakah suatu program bisa bertahan secara jangka panjang atau justru berhenti di tengah jalan saat menghadapi masalah.

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Teori Efektivitas Menurut Sondang P. Siagian: 1. Kejelasan Tujuan 2. Kejelasan Strategi 3. Proses Analisis Dan Perumusan Kebijakan 4. Perencanaan 5. Penyusunan Program 6. Tersedianya Sarana, Prasarana, dan Alokasi Anggaran. 7. Pelaksanaan Program 8. Sistem Pengawasan dan Pengendalian	Pemahaman dan Ketepatan Sasaran	1. Tingkat pemahaman Masyarakat tentang tujuan Kampung KB 2. Kejelasan tujuan program bagi pelaksana 3. Ketepatan Sasaran
	SOP	1. Adanya strategi sosialisasi program 2. Kejelasan SOP pelaksanaan kegiatan
	Pengambilan Keputusan dan Kebutuhan Lapangan	1. Kesesuaian program dengan kebutuhan Masyarakat 2. Respons terhadap masalah di lapangan
	Jadwal Kerja dan Pembagian Tugas	1. Kejelasan jadwal kegiatan 2. Kesesuaian rencana dengan pelaksanaan
	Kesesuaian	1. kesesuaian program dengan kondisi Masyarakat 2. kemampuan program meningkatkan partisipasi
	Ketersediaan Dana dan Fasilitas	1. Ketersediaan anggaran program 2. Ketersediaan fasilitas pendukung (media, sosialisasi, tempat, dll)
	SDM	1. Keaktifan pelaksanaan program 2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan 3. Tingkat partisipasi masyarakat
	Evaluasi	1. Adanya monitoring kegiatan 2. Koordinasi antar pelaksana

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2022). Teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Desa Kayakah, Kecamatan Amuntai Selatan. Observasi difokuskan pada kondisi fisik sekretariat Kampung KB, sarana prasarana pendukung, serta aktivitas kegiatan penyuluhan yang sedang berlangsung untuk melihat kesesuaian antara laporan dengan realita di lapangan.

2. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*). Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada informan (Kades, PLKB, Masyarakat) berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun, namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk memberikan pandangan lebih dalam terkait efektivitas program.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen pelengkap seperti foto-foto kegiatan, Surat Keputusan (SK) pembentukan Kampung KB, notulensi rapat, dan data statistik desa guna memperkuat hasil wawancara dan observasi.

4. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana sebagaimana dikutip oleh Hardani et al. (2020), yang meliputi:

1. Kondensasi Data

Proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang diperoleh dari Desa Kayakah mengenai pelaksanaan Kampung KB dipilah mana yang relevan dengan indikator efektivitas dan mana yang tidak, kemudian disederhanakan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan akhir akan menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas program Kampung KB di Desa Kayakah.

H. Uji Kredibilitas

Menurut Sugiyono (2022:185-193), agar data hasil penelitian kualitatif bisa dipercaya (kredibel), peneliti perlu melakukan beberapa langkah pengujian. Langkah-langkah tersebut meliputi:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti perlu kembali lagi ke lapangan untuk memastikan ulang apakah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya itu benar atau tidak. Fokusnya adalah melihat apakah ada informasi yang berubah seiring berjalannya waktu. Kalau setelah dicek ulang ternyata datanya tetap konsisten dan valid, berarti data tersebut sudah kredibel dan tahapan perpanjangan pengamatan bisa disudahi.

2. Peningkatan Ketekunan

Langkah ini menuntut peneliti untuk melakukan pengamatan yang lebih teliti, cermat, dan berkesinambungan. Lewat cara ini, semua urutan peristiwa dan kepastian data bisa terekam dengan jelas dan sistematis. Ketekunan ini juga berfungsi untuk memastikan tidak ada data yang salah tangkap, sekaligus membantu peneliti untuk mendeskripsikan hasil pengamatannya di lapangan dengan jauh lebih akurat.

3. Triangulasi

Ini adalah metode silang untuk mengecek kebenaran data dari berbagai sudut pandang. Peneliti bisa membandingkan kebenaran informasi dengan menanyakannya ke pihak yang berbeda (triangulasi sumber), menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda untuk hal yang

sama (triangulasi teknik), atau mengambil data di situasi dan waktu yang berbeda (triangulasi waktu).

4. Penggunaan Bahan Referensi

Peneliti wajib melampirkan bukti fisik atau rekam jejak pendukung untuk membuktikan bahwa data yang diklaim itu benar-benar ada dan terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, bahan referensi yang dipakai untuk memvalidasi data bisa berupa foto-foto kegiatan dan dokumen-dokumen yang tersedia.

5. *Membercheck*

Ini adalah tahapan konfirmasi di mana peneliti menunjukkan draf temuan datanya kepada pihak yang memberikan informasi. Tujuannya sederhana: memastikan apakah pemahaman dan tafsiran peneliti sudah pas dengan maksud si pemberi data. Kalau informan setuju, datanya sah dan bisa dipercaya. Tapi kalau ada perbedaan pendapat yang tajam antara penafsiran peneliti dan maksud informan, peneliti wajib berdiskusi lagi dan mengoreksi temuannya agar persis dengan keterangan asli dari informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2023). *Pedoman Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*. Jakarta: BKKBN.
- Hardani, et al. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang *Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*.
- Jannah, D., & Nafi'ah, B. (2023). Analisis Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keberhasilan Peningkatan Daya Saing UMKM. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(8), 260-287.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (2022). *Pedoman Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas*. Jakarta: Kemenko PMK.
- Nurhidayah. (2024). *Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar* [Skripsi Sarjana]. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Pasolong, H. (2021). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga*.

- Saputra, M, I., Raudah, S., & Barkatullah, (2026). Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Hikun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Sholihin, M. (2023). *Efektivitas Program Kampung KB di Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan* [Skripsi Sarjana]. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160-166.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*.